



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR B.222/KPTS/PW.200/H/02/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA
UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN TEBU
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya tebu, perlu adanya pemantauan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja untuk Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan dalam memantau kinerja kegiatan pengembangan areal produktif tanaman tebu di Kementerian Pertanian pada Tahun 2016.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,**

JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.;

1. Menteri Pertanian RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Sekretaris Itjen;
4. Inspektur I;
5. Inspektur II;
6. Inspektur III;
7. Inspektur IV;
8. Inspektur Investigasi.

1.3 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah : (1) berjalannya pengembangan areal produktif tanaman tebu secara efektif, efisien, ekonomis dan tertib sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku; (2) tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK); dan (3) tercapainya target RENSTRA Kementerian Pertanian.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan pemantauan ini mencakup (1) pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pengembangan areal produktif tanaman tebu setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan yang dilaksanakan Satker yang bertanggungjawab dalam pengembangan tanaman kakao di tingkat provinsi dan kabupaten (satker mandiri) dan (2) Pelaporan hasil pemantauan setiap bulan, triwulan, semester, akhir tahun dan peringatan dini (early warning).

1.5 Metode Penyajian

Petunjuk pelaksanaan pemantauan ini disajikan dengan metode yang praktis tanpa banyak menyinggung hal-hal yang bersifat teoritis namun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga diharapkan dapat dengan mudah dimengerti dan dilaksanakan oleh semua pihak yang menangani kegiatan pemantauan.

Cara pengisian dan penyajian setiap bentuk kegiatan pemantauan dan pelaporan akan dijelaskan sedemikian rupa, sehingga kekeliruan mengenai pemahaman terhadap kegiatan pemantauan dan pelaporan serta ketidaktepatan frekuensi penyampaian laporan diharapkan tidak sampai terjadi dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaannya.

1.6 Definisi/Pengertian

Untuk menyamakan persepsi, berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam petunjuk pelaksanaan ini :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
2. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan dana untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Pelaporan adalah bentuk penyampaian informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan ke dalam formulir yang telah ditentukan secara berkala dan sesuai dengan petunjuk pengisiannya.
7. Aplikasi 3.pertanian.go.id/simwas adalah salah satu fitur di website Itjen Kementan (itjentan.pertanian.go.id) yang berisikan perangkat lunak yang dapat di *up date* secara *on-line* yang merupakan Sistem

LAMPIRAN I KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B. 223 /KPTS/PW.200 /H/02/2016

TANGGAL : 15 Februari 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA UNTUK KEGIATAN PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN TEBU TAHUN 2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian tahun 2015-2019 mengacu pada Paradigma Pertanian untuk Pembangunan (Agriculture for Development) yang memposisikan sektor pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tatakelola pembangunan. Sasaran pembangunan pertanian ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dengan mencermati hasil evaluasi selama periode lima tahun terakhir dan perubahan paradigma sebagaimana tertuang dalam SIPP, maka sasaran strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019, yaitu: (1) Pencapaian swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi gula dan daging; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspordan substitusi impor; (4) penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; (5) peningkatan pendapatan keluarga petani, serta (6) akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Berdasarkan sasaran strategis tersebut, Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 (tujuh) Strategi Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP), meliputi: (1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) Penguatan kelembagaan petani, (5) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, (6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, dan (7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Selain itu, Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 (Sembilan) Strategi Pendukung yaitu: (1) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian, (2) Peningkatan dukungan perkarantina, (3) Peningkatan dukungan inovasi dan teknologi, (4) Pelayanan informasi publik, (5) Pengelolaan regulasi, (6) Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, (7) Pengelolaan perencanaan, (8) Penataan dan penguatan organisasi, dan (9) Pengelolaan sistem pengawasan.

Hasil evaluasi pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini dan diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, yaitu: (1) Alih fungsi lahan, konsevasi lahan yang tidak terkendali, keterbatasan dalam pencetakan lahan baru, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan ketidakpastian status kepemilikan lahan; (2) infrastruktur, kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat

menurun, terbatasnya jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas; (3) sarana produksi, belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi; (4) regulasi, beberapa kebijakan Pemerintah yang ditetapkan belum berjalan efektif dan belum berpihak pada sektor pertanian; (5) kelembagaan dan sumberdaya manusia, kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat, keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi dan menurunnya minat generasi muda; (6) permodalan, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan mengembangkan skema kredit dengan subsidi suku bunga sehingga suku bunga beban petani lebih rendah, namun demikian skema kredit tersebut belum mampu mengatasi permodalan petani dan dukungan perbankan belum memberikan kontribusi yang optimal bagi petani.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian Pertanian, disamping ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung fungsi pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Pertanian merupakan lembaga pengawasan internal yang independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diharapkan dapat menjadi “mitra pro-aktif” dan mediator dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian baik di pusat maupun di daerah.

Sebagai bagian dari manajemen, pengawasan intern memegang peranan penting untuk terlaksananya program pembangunan pertanian dan implementasi kebijakan strategis di bidang pertanian, serta mengeliminir permasalahan-permasalahan sektor pertanian di atas. Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern Kementerian Pertanian memegang peran strategis dalam upaya perbaikan manajemen dalam pengelolaan program melalui kegiatan pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengacu pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan pertanian yang bertanggungjawab, bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Kepotisme (KKK) dan mendorong institusi pertanian yang akuntabel melalui pengawasan yang bersih dan profesional.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan tugas pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi Inspektorat Jenderal yaitu: (1) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian; (2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; (3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Menteri; (4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; (5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Kebijakan pengawasan Intern Kementerian Pertanian diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Jenderal dalam rangka membantu dan mendorong pencapaian program pembangunan pertanian dan pelayanan publik di Kementerian Pertanian sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan dicapai secara efektif, efisien dan bersih dari KKN yaitu: (a) Peningkatan akuntabilitas pembangunan pertanian; (b) Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan (c) Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jenderal.

Dalam rangka efektivitas operasionalisasi kebijakan pengawasan intern, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu (1) Pengawasan fokus pada program peningkatan kedaulatan pangan; (2) Pematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian; dan (3) Audit, pengawalan (asistensi dan konsultansi), reviu dan evaluasi berbasis capaian kinerja (Results-Based Monitoring and Evaluation System). Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2015 – 2019 diarahkan pada 8 (delapan) kegiatan strategis dalam rangka mendukung swasembada pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Daging, Gula, Bawang Merah, Cabai dan Kakao).

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Untuk melaksanakan pemantauan tersebut maka disusun Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Kinerja Pengembangan areal produktif tanaman tebu.

1.2 Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi para pegawai Inspektorat Jenderal dalam melakukan pemantauan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu. Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu mulai dari input, proses dan output kegiatan pada tahun berjalan serta outcome/manfaat kegiatan tahun sebelumnya
2. Mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan dari aspek teknis maupun administrasi serta upaya-upaya pemecahan yang akan/telah dilakukan;
3. Melakukan pencegahan secara dini kemungkinan terjadinya penyimpangan berdasarkan indikasi yang ada;
4. Menyiapkan dan menyajikan hasil pemantauan yang *up to date* dan siap direkomendasikan kepada Penanggungjawab program/kegiatan;
5. Memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertanian dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu dimasa yang akan datang.

Informasi Manajemen Pengawasan Terpadu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (SIMPATIK) yang dikelola Bagian Perencanaan Pengawasan Itjen Kementan.

8. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
 9. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan tekad dan janji Rencana Kerja Tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan Instansi Pemerintah/Unit Kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.
 10. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
 11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan (input, output, outcome).
 12. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program dan kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
 13. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
 14. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
 15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 16. Realisasi Fisik adalah capaian volume kegiatan dan atau progres fisik kegiatan yang dihitung berdasarkan bobot fisik sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Monev Pembangunan Perkebunan.
- 1.7 Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

BAB II

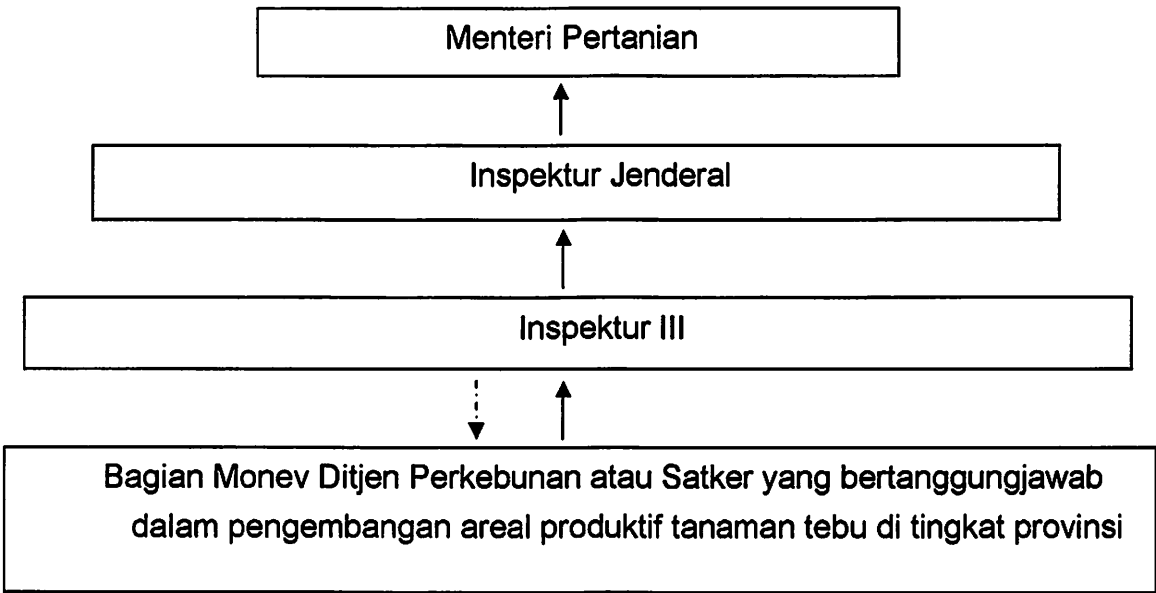
ORGANISASI PELAKSANAAN PEMANTAUAN KINERJA PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN TEBU

2.1 Organisasi Pelaksanaan Pemantauan Kinerja

Organisasi Pelaksanaan pemantauan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu terdiri dari Penanggungjawab Kegiatan dibantu dengan Tim yang ditunjuk.

2.2 Tata Hubungan Pelaksanaan Pemantauan Kinerja

Untuk mendukung pelaksanaan sistem pemantauan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu, perlu ditetapkan tata hubungan kerja dalam pelaksanaan pemantauan yaitu Penanggungjawab kegiatan beserta tim melakukan pemantauan kinerja pengembangan areal produktif tanaman tebu dengan cara meminta data langsung ke Bagian Monev Ditjen Perkebunan dan mengumpulkan data langsung ke Satker yang bertanggungjawab dalam pengembangan areal produktif tanaman tebu di tingkat provinsi dan kabupaten (satker mandiri) pada saat melakukan audit maupun pengawasan lainnya (Pendampingan dan Evaluasi) setiap bulan, triwulanan, semester dan tahunan.



Keterangan : ----> Pemantauan —> Pelaporan

Gambar 1. Alur Organisasi dan Tata Laksana Pemantauan Kinerja Pengembangan areal produktif tanaman tebu

2.3 Pelaksanaan Pemantauan Kinerja dan Pelaporan

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemantauan kinerja dan pelaporan, maka Sekretariat Itjen agar menyediakan dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan bersumber dari APBN

BAB III
PEMANTAUAN KINERJA PENGEMBANGAN
TANAMAN TEBU

3.1 Mekanisme Pemantauan

Pemantauan dilakukan setiap bulan, triwulanan, semester dan tahunan dengan menilai kemajuan pelaksanaan setiap tahap kegiatan pengembangan areal produktif tanaman tebu dengan rincian sebagaimana form terlampir dapat dikemukakan sebagai berikut.

Tabel 1. Jenis Data Yang Dipantau Setiap Tahapan Teknis Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu

NO.	TAHAPAN PEMANTAUAN KEGIATAN	DATA YANG DIPANTAU	SUMBER DATA
1.	Identifikasi CP/CL	Jumlah CP/CL	Daftar Usulan CP/CL dari Kabupaten SK. CP/CL
2.	Penyiapan Lahan	Jumlah Anggaran Bantuan Penyiapan lahan, Pembersihan lahan	RKAKL
3.	Proses dan Pelaksanaan Pengadaan Saprodi	Realisasi Anggaran dan Fisik Saprodi.	RKAKL Kontrak
4.	Penanaman/Intensifikasi/Sambung Samping	Realisasi Tanam/ Sambung Samping/	Laporan Kelompok/ PLP TKP/Audit Fisik Lapangan
5.	Produksi/Produktivitas	Jumlah Hasil Panen Kakao	Laporan Kelompok/ PLP TKP/Audit Fisik Lapangan

Kegiatan pengembangan areal produktif tanaman tebu yang dipantau meliputi:

1. Kegiatan Bongkar Ratoon
2. Kegiatan Rawat Ratoon
3. Kegiatan Perluasan Tebu di Lahan Kering

Sasaran areal dan anggaran per kegiatan dapat dikemukakan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. LOKASI PENGEMBANGAN TANAMAN TEBU TAHUN 2016

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN		VOLUME	ANGGARAN (Rp)
		PROVINSI	KABUPATEN		
1	Bongkar Ratoon	10	22	1.365 Ha	17.781.637.500
2	Rawat Ratoon	11	57	35.483 Ha	201.179.987.500
3	Penanaman Tanaman Tebu	11	28	10.567 Ha	136.405.437.500
4	Bantuan Peralatan - Fertilizer Applicator	12	0	81 Unit	8.505.000.000
5	Bantuan Peralatan - Grab Loader	3	1	5 Unit	4.750.000.000
6	Bantuan Peralatan - Pompa Air	6	16	214 Unit	5.350.000.000

Rincian per kabupaten terlampir

Pemantauan dilaksanakan melalui dua metode: yaitu metode penyampaian laporan secara rutin dari unit kerja Eselon I penanggung jawab program kepada Inspektorat III dan pemantauan secara langsung ke lapangan oleh Tim yang dibentuk Inspektur III, dengan mekanisme sebagai berikut:

3.1.1 Mekanisme Pemantauan Secara Rutin untuk memperoleh Data Sekunder

1. Kegiatan pemantauan dilakukan selama 1 tahun sesuai tahapan teknis kegiatan guna memantau output kegiatan yang sedang berjalan dan memantau outcome kegiatan yang telah berjalan tahun sebelumnya.
2. Bagian Monev Ditjen Perkebunan maupun KPA/PPK Satker di daerah selaku pengelola kegiatan wajib membuat dan menyampaikan laporan rutin atas kemajuan fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan

Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut. Laporan tersebut disampaikan kepada Inspektur II yang disampaikan secara elektronik (email) setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan. Format laporan pemantauan terlampir. Diharapkan pelaporan secara elektronik tersebut dapat masuk sistem informasi website SIMPATIK Itjen Kementan dalam Aplikasi3.pertanian.go.id/simwas.

3. Dalam rangka menjamin terlaksananya pemantauan tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao, perlu didukung dengan surat edaran dari Inspektur Jenderal yang mewajibkan Ditjen Perkebunan untuk membuat dan menyampaikan laporan rutin atas kemajuan fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut.
4. Penanggung jawab pengelola laporan rutin di Inspektorat III bertugas untuk melakukan rekapitulasi capaian fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut berdasarkan laporan rutin Ditjen Perkebunan dan Satker/Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) setiap bulan/triwulan/ semesteran/tahunan.

3.1.2 Mekanisme Pemantauan Secara Langsung ke Lapangan untuk memperoleh Data Primer

Untuk menguji akurasi dan permasalahan yang tertuang dalam laporan rutin kemajuan fisik dan keuangan setiap tahapan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Kakao pada seluruh Satker pengelola kegiatan tersebut, yang disampaikan oleh Ditjen Perkebunan sebagaimana diuraikan pada butir 3.1.1 diatas, maka dilakukan kegiatan pemantauan secara langsung ke lapangan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim pengelola laporan rutin Inspektorat III mengajukan rencana pemantauan ke lapangan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang perlu diuji akurasi data dari laporan Ditjen Perkebunan.
2. Rencana pemantauan ke lapangan diusulkan kepada Inspektur III untuk mendapatkan surat tugas dan dalam pelaksanaan di lapangan diwajibkan untuk mengisi form pemantauan lapangan di tingkat dan alternatif solusi terhadap permasalahan yang telah dirumuskan diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pihak satker (KPA/PPK).
3. Tim melakukan pemantauan di tingkat Satker/Dinas yang membidangi Perkebunan ditingkat Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) dan dilanjutkan melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang kendala dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Tim menyusun laporan sementara dan memberikan solusi guna ditindaklanjuti oleh pihak Satker/Dinas yang membidangi Perkebunan ditingkat Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri).
5. Solusi yang belum dapat ditindaklanjuti oleh pihak Satker saat pemantauan maka akan dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut tersebut oleh Inspektorat Jenderal dengan menghubungi personil (Contact Person) di Satker Dinas Provinsi atau Kabupaten (Satker Mandiri)
6. Setelah selesai melakukan pemantauan ke lapangan maka tim membuat laporan untuk disampaikan kepada kepala Dinas Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) dengan tembusan kepada

Penanggungjawab Program/Ditjen Perkebunan sebagaimana format terlampir.

Dalam rangka melakukan pemantauan tersebut perlu disediakan anggaran operasional untuk tim pengelola secara memadai melalui RKAKL Itjen Kementan dan membangun sitem pelaporan berbasis website yang merupakan satu kesatuan dengan sistem Itjen Kementan (Simpatik).

3.2 Pelaporan Hasil Pemantauan

Laporan rutin dari Bagian Monev Ditjen Perkebunan maupun KPA/PPK Satker di daerah selaku pengelola kegiatan dikirimkan melalui via email resmi yang telah ditentukan oleh Inspektur III . Sedangkan laporan kegiatan pemantauan langsung ke lapangan dibuat sesuai format sebagaimana terlampir.

Data yang dikumpulkan dalam pemantauan secara rutin maupun secara langsung ke lapangan sebagaimana tabel 1 diatas dengan format sebagaimana terlampir. Selanjutnya dilakukan tabulasi oleh Penanggung Jawab kegiatan pemantauan untuk dibuat laporan bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan dan dikirim kepada Satker/Dinas Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri) dan Ditjen Perkebunan sebagaimana format terlampir.

Laporan yang dibuat Penanggungjawab kegiatan Inspektorat III berupa laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan kondisi tertentu yang memerlukan penanganan segera (early warning) dengan format sebagaimana terlampir.

Jenis dan waktu pelaporan sebagai berikut :

1. Laporan Inspektur Kepada Inspektur Jenderal
 - a. Laporan Bulanan dikirim setiap tanggal 5 bulan berikutnya
 - b. Laporan Triwulan dikirim setiap tanggal 5 bulan keempat
 - c. Laporan Semesteran dikirim setiap tanggal 5 bulan ketujuh
 - d. Laporan Tahunan dikirim setiap tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya
2. Laporan Inspektur Jenderal kepada Menteri
 - a. Laporan Triwulan dikirim setiap tanggal 10 bulan keempat
 - b. Laporan Semesteran dikirim setiap tanggal 10 bulan ketujuh
 - c. Laporan Tahunan dikirim setiap tanggal 10 bulan bulan Januari tahun berikutnya

3.3 Titik Rawan Pemantauan

1. Anggaran

Anggaran Pemantauan dalam DIPA RKA/KL Tahun 2016 tidak dialokasikan.

2. Sarana

Sistem Pemantauan belum tersambung dengan website Itjen Kementan (Simpatik)

3. Pelaksanaan Pemantauan

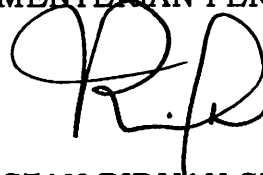
- a. Target pelaksanaan kegiatan tidak ditetapkan oleh Satker/Dinas/Ditjen.

- b. Pengiriman data dari Satker atau Eselon 1 tidak tepat waktu dan tidak valid.
- c. Solusi yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan yang tidak mencapai target tidak tepat/tidak mendukung pelaksanaan program secara efektif.
- d. Pengiriman oleh Early Warning System terlambat.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan pemantauan ini diharapkan dapat menjadi acuan resmi para stakeholder Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian. Petunjuk pelaksanaan ini bersifat dinamis sehingga akan dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis.

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

NOMOR : B. /KPTS/PW. / H/02/2016

TANGGAL : 15 Februari 2016

No.	Format	Tentang	Ditandatangani
1.	Format-1	Perkembangan Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016 (MT. 2016/2017)	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
2.	Format-2	Perkembangan Kegiatan Bongkar Ratoon Tanaman Tebu Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
3.	Format-3	Perkembangan Kegiatan Rawat Ratoon 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
4.	Format-4	Perkembangan Kegiatan Perluasan Tanaman Tebu Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
5.	Format-5	Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tanaman Tebu Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
6.	Format-6	Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tanaman Tebu Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
7.	Format-7	Perkembangan Penyaluran Peralatan dan Mesin Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
8.	Format-8	Perkembangan Areal Penanaman, Produksi dan Produktivitas Tebu dan Gula Tahun 2015 dan 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
9.	Format-9	Perkembangan/Progress Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
10.	Format-10	Lokasi Pengembangan Tanaman Tebu Tahun 2016	KEPALA DINAS/KABID/PPK KABUPATEN/PROVINSI
11.	Format-11	Laporan Hasil Pemantauan Individual/Provinsi kepada Kadisbun Prop/Kab Oleh Tim Pemantau	INSPEKTUR
12.	Format-12	Laporan Hasil Pemantauan kepada Dirjenbun Oleh Irjen	INSPEKTUR
13.	Format-13	Surat Pengantar Masalah kepada Satker	INSPEKTUR JENDERAL

14.	Format-14	Surat Pengantar Masalah kepada Ditjenbun	INSPEKTUR JENDERAL
-----	-----------	---	--------------------

INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



JUSTAN RIDUAN SIAHAAN

PERKEMBANGAN KEGIATAN PENGEMBANGAN AREAL PRODUKTIF TANAMAN TEBU
TAHUN 2016 (MT 2016/2017)
SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

JADWAL TANAM : POLA 1/POLA 2(coret salah satu)

No	KABUPATEN / KOTA	Anggaran (Rp)	TARGET			REALISASI														
			Volume Berdasarkan SK Gubernur																	
			PLANT CANE (HA)	RAWAT RATOON (HA)		PLANT CANE (HA)								RAWAT RATOON (HA)						
				R1	R2	PERLUASAN				BONGKAR RATOON				Anggaran (R1+R2) (APBN Rp)	R1			R2		
						ANGGARAN (APBN Rp)	APBN	SWADAYA	PG	ANGGARAN (APBN Rp)	APBN	SWADAYA	PG		APBN	SWADAYA	PG	APBN	SWADAYA	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Jumlah																			

Ket. Plant Cane termasuk Bongkar Ratoon dan Perluasan

....., 2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

(.....)
NIP.

PERKEMBANGAN KEGIATAN BONGKAR RATOON TANAMAN TEBU TAHUN 2016
PROVINSI
SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

JADWAL TANAM : POLA 1/POLA 2(coret salah satu)

No	KABUPATEN	TANAM				SUMBER BENIH								KONDISI LAHAN YANG BELUM REALISASI TANAM (HA)			
		TARGET		REALISASI		Pembangunan KBD (APBN)				PEMBELIAN BENIH							
		LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		TAHAP OLAH LAHAN	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA	TERLANJUR TANAM KOMODITAS LAIN	TIDAK JELAS
						KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kab.....																
	Kab.																
	Kab.....																
JUMLAH																	

Ket: Rencana Panen Tanggal.... Bulan....

.....,2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

(.....)
NIP.

PERKEMBANGAN KEGIATAN RAWAT RATOON 2016

PROVINSI

SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

JADWAL TANAM : POLA I/POLA 2(coret salah satu)

No	KABUPATEN	TANAM				KONDISI YANG BELUM RAWAT RATOON		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		LUAS (HA)	LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	TUNGGU PANEN TANAMAN	TIDAK JELAS	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Kab..... Kab. Kab.....							
	JUMLAH							

Ket *) : Rencana Panen Tanggal.... Bulan....

..... 2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

(.....)
NIP.

PERKEMBANGAN KEGIATAN PERLUASAN TANAMAN TEBU TAHUN 2016
PROVINSI
SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

JADWAL TANAM : POLA 1/POLA 2(coret salah satu)

No	KABUPATEN	TANAM				SUMBER BENIH								KONDISI LAHAN YANG BELUM REALISASI TANAM (HA)			
		TARGET		REALISASI		Pembangunan KBD (APBN)				PEMBELIAN BENIH							
		LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI		TAHAP OLAH LAHAN	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA	TERLANJUT TANAM KOMODITAS LAIN	TIDAK JELAS
						KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kab..... Kab. Kab.....																
	JUMLAH																

Ket : Rencana Panen Tanggal.... Bulan.....

.....,2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

(.....)
NIP.

(.....)

NIP.

PERKEMBANGAN PENYALURAN PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2016
PROVINSI.....
SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

No	KABUPATEN	REALISASI PENYALURAN																	
		TRAKTOR 4 WD		Fertilizer Aplicator		Grabloader		Cane Thumpher		Hand Refractometer		Harvester		Dump Truck		GPS		Pompa Air	
		TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)	TARGET (unit)	REALISAS I (unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

....,2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

(.....)
NIP.

Perkembangan Areal Penanaman, Produksi dan Produktivitas Tebu dan Gula Tahun 2015 dan 2016

Propinsi :

SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

JADWAL TANAM : POLA I/POLA 2(coret salah satu)

No.	Pabrik Gula/Tahun	Luas KTG			Tebu				Gula				Rendemen		Ket **
		Target Tanam	Realisasi Tanam	Realisasi Giling*	Produksi		Produktivitas		Produksi		Produktivitas				
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi			
					(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton)	(Ton/Ha)	(Ton/Ha)	(Ton)	(Ton)	(Ton/Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1 TA 2015 (Musim Giling 2014/2015)															
2 TA 2016 (Musim Giling 2015/2016)															

Keterangan :
* luas panen/ luas tebang
** diisi penyebab penurunan/kenaikan produktivitas tebu/gula dan rendemen

.....2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

(.....)
NIP.

Perkembangan/Prograss Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2016
Provinsi:
KEGIATAN : BONGAR RATOON / RAWAT RATOON / PERLUASAN (coret salah satu)
SAAT PELAPORAN: BULAN...../TRIWULAN...../SEMESTER.....(coret salah satu)

No.	Realisasi Pelaksanaan		JENIS BARANG								
			Traktor 4 WD	Fertilizer Aplicator	Grabloader	Cane Thumper	Hand Refractometer	Harvester	Dump Truck	GPS	Pompa Air
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Target									
		Realisasi									
2	Pembentukan ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan	Target									
		Realisasi									
3	Pra/Pasca Kualifikasi Pengadaan	Target									
		Realisasi									
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target									
		Realisasi									
5	Pengumuman Pelelangan	Target									
		Realisasi									
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target									
		Realisasi									
7	Penentuan HPS	Target									
		Realisasi									
8	Penjelasan Lelang	Target									
		Realisasi									
9	Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan Penawaran	Target									
		Realisasi									
10	Evaluasi Penawaran	Target									
		Realisasi									
11	Penetapan Pemenang	Target									
		Realisasi									
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target									
		Realisasi									
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target									
		Realisasi									
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target									
		Realisasi									
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target									
		Realisasi									
16	Pelaksanaan Kontrak	Target									
		Realisasi									

.....2016
Kadis/Kabid.....
Dinas.....

{.....}
NIP.

LOKASI PENGEMBANGAN TANAMAN TEBU TAHUN 2016

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	ANGGARAN
Bongkar Ratoon			1,365 Ha	17,781,637,500
1	JAWA BARAT	1 Kab. Subang	50 Ha	740,625,000
		2 Kab. Cirebon	100 Ha	1,481,250,000
		3 Kab. Kuningan	200 Ha	2,962,500,000
2	JAWA TENGAH	4 Kab. Semarang	21 Ha	253,312,500
		5 Kab. Grobogan	20 Ha	241,250,000
		6 Kab. Kudus	35 Ha	422,187,500
		7 Kab. Rembang	178 Ha	2,147,125,000
		8 Kab. Magelang	21 Ha	253,312,500
		9 Kab. Purworejo	100 Ha	1,206,250,000
		10 Kab. Klaten	70 Ha	844,375,000
		11 Kab. Boyolali	50 Ha	603,125,000
3	DI YOGYAKARTA	12 Kab. Sleman	30 Ha	333,825,000
4	JAWA TIMUR	13 Kab. Banyuwangi	20 Ha	224,250,000
5	ACEH	14 Kab. Bener Meriah	50 Ha	798,750,000
6	SUMATERA BARAT	15 Kab. Agam	20 Ha	248,250,000
		16 Kab. Tanah Datar	25 Ha	310,312,500
7	SUMATERA SELATAN	17 Kab. Ogan Ilir	50 Ha	670,625,000
8	LAMPUNG	18 Kab. Lampung Tengah	20 Ha	233,250,000
		19 Kab. Lampung Utara	55 Ha	641,437,500
9	SULAWESI SELATAN	20 Kab. Bone	50 Ha	573,125,000
10	GORONTALO	21 Kab. Gorontalo	125 Ha	1,620,312,500
		22 Kab. Boalemo	75 Ha	972,187,500
Rawat Ratoon			35,483 Ha	201,179,987,500
1	JAWA BARAT	1 Kab. Subang	100 Ha	761,250,000
		2 Kab. Cirebon	600 Ha	4,567,500,000
		3 Kab. Kuningan	500 Ha	3,806,250,000
2	JAWA TENGAH	4 Kab. Semarang	131 Ha	794,187,500
		5 Kab. Grobogan	300 Ha	1,818,750,000
		6 Kab. Kudus	300 Ha	1,818,750,000
		7 Kab. Pemalang	100 Ha	606,250,000
		8 Kab. Jepara	400 Ha	2,425,000,000
		9 Kab. Rembang	1,500 Ha	9,093,750,000
		10 Kab. Blora	500 Ha	3,031,250,000
		11 Kab. Purworejo	200 Ha	1,212,500,000
		12 Kab. Kebumen	50 Ha	303,125,000
		13 Kab. Klaten	150 Ha	909,375,000
		14 Kab. Boyolali	250 Ha	1,515,625,000
		15 Kota Semarang	50 Ha	303,125,000
3	DI YOGYAKARTA	16 Kab. Bantul	150 Ha	680,625,000
		17 Kab. Sleman	150 Ha	680,625,000
		18 Kab. Gunung Kidul	250 Ha	1,134,375,000
		19 Kab. Kulon Progo	55 Ha	249,562,500
4	JAWA TIMUR	20 Kab. Gresik	250 Ha	1,303,125,000
		21 Kab. Mojokerto	1,500 Ha	7,818,750,000
		22 Kab. Sidoarjo	500 Ha	2,606,250,000
		23 Kab. Jombang	1,500 Ha	7,818,750,000
		24 Kab. Bangkalan	50 Ha	260,625,000
		25 Kab. Bondowoso	100 Ha	521,250,000
		26 Kab. Situbondo	500 Ha	2,606,250,000

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	ANGGARAN
		27 Kab. Banyuwangi	50 Ha	260,625,000
		28 Kab. Jember	2,000 Ha	10,425,000,000
		29 Kab. Malang	2,500 Ha	13,031,250,000
		30 Kab. Pasuruan	300 Ha	1,563,750,000
		31 Kab. Probolinggo	750 Ha	3,909,375,000
		32 Kab. Lumajang	1,000 Ha	5,212,500,000
		33 Kab. Kediri	1,500 Ha	7,818,750,000
		34 Kab. Tulungagung	750 Ha	3,909,375,000
		35 Kab. Nganjuk	500 Ha	2,606,250,000
		36 Kab. Trenggalek	200 Ha	1,042,500,000
		37 Kab. Blitar	750 Ha	3,909,375,000
		38 Kab. Madiun	1,000 Ha	5,212,500,000
		39 Kab. Ngawi	750 Ha	3,909,375,000
		40 Kab. Magetan	1,000 Ha	5,212,500,000
		41 Kab. Ponorogo	250 Ha	1,303,125,000
		42 Kab. Bojonegoro	500 Ha	2,606,250,000
		43 Kab. Tuban	300 Ha	1,563,750,000
		44 Kab. Lamongan	1,300 Ha	6,776,250,000
		45 Kota Mojokerto	100 Ha	521,250,000
		46 Kota Kediri	250 Ha	1,303,125,000
5	JAMBI	47 Kab. Kerinci	40 Ha	340,500,000
6	SUMATERA SELATAN	48 Kab. Ogan Komering Ilir	550 Ha	4,076,875,000
		49 Kab. Ogan Ilir	300 Ha	2,223,750,000
7	LAMPUNG	50 Kab. Lampung Tengah	900 Ha	5,456,250,000
		51 Kab. Lampung Utara	1,150 Ha	6,971,875,000
		52 Kab. Way Kanan	1,600 Ha	9,700,000,000
8	SULAWESI SELATAN	53 Kab. Bone	400 Ha	2,025,000,000
9	NUSA TENGGARA BARAT	54 Kab. Dompu	4,087 Ha	25,901,362,500
10	MALUKU UTARA	55 Kab. Halmahera Timur	70 Ha	459,375,000
11	GORONTALO	56 Kab. Gorontalo	300 Ha	1,968,750,000
		57 Kab. Boalemo	200 Ha	1,312,500,000
Penanaman Tanaman Tebu			10,567 Ha	136,405,437,500
1	JAWA BARAT	1 Kab. Subang	50 Ha	990,625,000
		2 Kab. Kuningan	6 Ha	118,875,000
2	JAWA TENGAH	3 Kab. Semarang	7 Ha	66,937,500
		4 Kab. Rembang	25 Ha	239,062,500
		5 Kab. Temanggung	6 Ha	57,375,000
		6 Kab. Purworejo	5 Ha	47,812,500
		7 Kab. Boyolali	5 Ha	47,812,500
3	JAWA TIMUR	8 Kab. Pamekasan	200 Ha	3,242,500,000
		9 Kab. Banyuwangi	165 Ha	2,675,062,500
4	ACEH	10 Kab. Aceh Tengah	750 Ha	10,931,250,000
		11 Kab. Aceh Gayo Lues	150 Ha	2,186,250,000
		12 Kab. Bener Meriah	100 Ha	2,138,750,000
5	SUMATERA BARAT	13 Kab. Tanah Datar	20 Ha	343,250,000
6	JAMBI	14 Kab. Kerinci	50 Ha	975,625,000
7	SUMATERA SELATAN	15 Kab. Ogan Komering Ilir	300 Ha	5,523,750,000
		16 Kab. Ogan Ilir	200 Ha	3,682,500,000
8	LAMPUNG	17 Kab. Lampung Tengah	250 Ha	4,390,625,000
		18 Kab. Lampung Utara	250 Ha	4,390,625,000
		19 Kab. Way Kanan	1,000 Ha	17,562,500,000
		20 Kab. Tulang Bawang Barat	300 Ha	5,268,750,000
9	SULAWESI SELATAN	21 Kab. Gowa	150 Ha	1,509,375,000
		22 Kab. Wajo	108 Ha	1,086,750,000

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	ANGGARAN
		23 Kab. Bone	550 Ha	5,534,375,000
		24 Kab. Maros	180 Ha	1,811,250,000
		25 Kab. Jeneponto	150 Ha	1,509,375,000
		26 Kab. Takalar	3,040 Ha	30,590,000,000
10	NUSA TENGGARA BARAT	27 Kab. Dompu	2,190 Ha	25,321,875,000
11	MALUKU UTARA	28 Kab. Halmahera Timur	360 Ha	4,162,500,000
Bantuan Peralatan - Fertilizer Applicator			81 Unit	8,505,000,000
1	DI YOGYAKARTA	1 Provinsi	4 Unit	420,000,000
2	JAWA TIMUR	2 Provinsi	37 Unit	3,885,000,000
3	ACEH	3 Provinsi	2 Unit	210,000,000
4	JAMBI	4 Provinsi	2 Unit	210,000,000
5	SUMATERA SELATAN	5 Provinsi	2 Unit	210,000,000
6	LAMPUNG	6 Provinsi	8 Unit	840,000,000
7	SULAWESI TENGAH	7 Provinsi	2 Unit	210,000,000
8	SULAWESI SELATAN	8 Provinsi	8 Unit	840,000,000
9	SULAWESI TENGGARA	9 Provinsi	8 Unit	840,000,000
10	NUSA TENGGARA BARAT	10 Provinsi	4 Unit	420,000,000
11	PAPUA	11 Provinsi	2 Unit	210,000,000
12	MALUKU UTARA	12 Provinsi	2 Unit	210,000,000
Bantuan Peralatan - Grab Loader			5 Unit	4,750,000,000
1	SUMATERA SELATAN	1 Kab. Ogan Komering Ilir	1 Unit	950,000,000
2	LAMPUNG	2 Provinsi	2 Unit	1,900,000,000
3	SULAWESI SELATAN	3 Provinsi	2 Unit	1,900,000,000
Bantuan Peralatan - Pompa Air			214 Unit	5,350,000,000
1	JAWA BARAT	1 Kab. Kuningan	7 Unit	175,000,000
2	JAWA TIMUR	2 Kab. Gresik	10 Unit	250,000,000
		3 Kab. Mojokerto	15 Unit	375,000,000
		4 Kab. Jombang	20 Unit	500,000,000
		5 Kab. Pamekasan	5 Unit	125,000,000
		6 Kab. Banyuwangi	10 Unit	250,000,000
		7 Kab. Probolinggo	5 Unit	125,000,000
		8 Kab. Tulungagung	20 Unit	500,000,000
		9 Kab. Blitar	15 Unit	375,000,000
		10 Kab. Ngawi	20 Unit	500,000,000
		11 Kota Mojokerto	10 Unit	250,000,000
3	ACEH	12 Kab. Bener Meriah	5 Unit	125,000,000
4	LAMPUNG	13 Kab. Lampung Tengah	10 Unit	250,000,000
		14 Kab. Way Kanan	30 Unit	750,000,000
5	SULAWESI SELATAN	15 Kab. Jeneponto	12 Unit	300,000,000
6	NUSA TENGGARA BARAT	16 Kab. Dompu	20 Unit	500,000,000
Bantuan Peralatan - Trailer (Alat Angkut)			66 Unit	7,590,000,000
1	JAWA BARAT	1 Provinsi	8 Unit	920,000,000
2	JAWA TIMUR	2 Provinsi	21 Unit	2,415,000,000
3	SUMATERA SELATAN	3 Provinsi	2 Unit	230,000,000
		4 Kab. Ogan Komering Ilir	2 Unit	230,000,000
4	LAMPUNG	5 Provinsi	10 Unit	1,150,000,000
5	SULAWESI TENGAH	6 Provinsi	2 Unit	230,000,000
6	SULAWESI SELATAN	7 Provinsi	6 Unit	690,000,000
7	SULAWESI TENGGARA	8 Provinsi	5 Unit	575,000,000
8	NUSA TENGGARA BARAT	9 Provinsi	6 Unit	690,000,000
9	PAPUA	10 Provinsi	2 Unit	230,000,000

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	VOLUME	ANGGARAN
10	MALUKU UTARA	11 Provinsi	2 Unit	230,000,000
Bantuan Peralatan - Traktor			18 Unit	15,300,000,000
1	JAWA BARAT	1 Provinsi	2 Unit	1,700,000,000
2	LAMPUNG	2 Provinsi	5 Unit	4,250,000,000
3	SULAWESI TENGAH	3 Kab. Tojo Una-una	2 Unit	1,700,000,000
4	SULAWESI SELATAN	4 Kab. Maros	2 Unit	1,700,000,000
5	SULAWESI TENGGARA	5 Kab. Muna	1 Unit	850,000,000
		6 Kab. Kolaka	1 Unit	850,000,000
		7 Kab. Konawe Selatan	1 Unit	850,000,000
		8 Kab. Bombana	1 Unit	850,000,000
6	NUSA TENGGARA BARAT	9 Provinsi	2 Unit	1,700,000,000
7	MALUKU UTARA	10 Kab. Halmahera Timur	1 Unit	850,000,000
Bantuan Peralatan : Truck			16 Unit	5,600,000,000
1	JAWA BARAT	1 Kab. Kuningan	2 Unit	700,000,000
2	JAWA TIMUR	2 Kab. Mojokerto	2 Unit	700,000,000
		3 Kab. Pamekasan	1 Unit	350,000,000
		4 Kab. Probolinggo	2 Unit	700,000,000
		5 Kab. Tulungagung	2 Unit	700,000,000
		6 Kab. Ngawi	2 Unit	700,000,000
		7 Kab. Magetan	2 Unit	700,000,000
		8 Kab. Lamongan	2 Unit	700,000,000
3	SUMATERA SELATAN	9 Kab. Ogan Ilir	1 Unit	350,000,000

**HASIL PEMANTAUAN INDIVIDUAL/PROVINSI KEPADA KADISBUN
PROVINSI/KABUPATEN OLEH TIM PEMANTAU**

Nomor : R.../PW.../.../.... 2016
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Kinerja atas
Laporan Bulan.../Triwulan(I, II, III,
IV).. /Semesteran...(I, II).. /Tahunan Kinerja
Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu
Tahun 2016

Yth. Kepala Dinas(yang Membidangi Perkebunan)
Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri).....
di

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, kami sampaikan laporan
Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV).. /Semesteran...(I, II).. /Tahunan hasil pemantauan
Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu TA.2016 sebagai berikut:

A. Simpulan dan Rekomendasi

.....
Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas
.....(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku
KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....
3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

.....
3.
.....

B. Uraian Hasil Pemantauan

- 1. Dasar Pemantauan
- 2. Tujuan Pemantauan
- 3. Ruang Lingkup Pemantauan
- 4. Temuan Hasil Pemantauan
 - a. Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016 (MT 2016/2017) dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

No	KABUPATEN / KOTA	Anggaran (Rp)	TARGET		REALISASI								
			Volume Berdasarkan SK Gubernur										
			PLANT CANE (HA)	RAWAT RATOON (HA)		PLANT CANE (HA)							
				R1	R2	PERLUASAN				BONGKAR RATOON			
						ANGGARAN (APBN Rp)	APBN	SWADAYA	PG	ANGGARAN (APBN Rp)	APBN	SWADAYA	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Jumlah													

No	KABUPATEN / KOTA	Anggaran (Rp)	PLANT CANE (HA)	TARGET		REALISASI						
				Volume Berdasarkan SK Gubernur								
				RAWAT RATOON (HA)		RAWAT RATOON (HA)						
				R1	R2	Anggaran (R1+R2) (APBN Rp)	R1			R2		
							APBN	SWADAYA	PG	APBN	SWADAYA	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Jumlah												

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- 1.
.....

2.
.....

b. Kegiatan Bongkar Ratoon

Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Ratoon per Tanggal..... dapat
dikemukakan pada tabel berikut:

No	KABUPATEN	TANAM				SUMBER BENIH							
		TARGET		REALISASI		Pembangunan KBD (APBN)				PEMBELIAN BENIH			
		LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
						KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kab..... Kab. Kab.												
	JUMLAH												

No	KABUPATEN	TANAM				KONDISI LAHAN YANG BELUM REALISASI TANAM (HA)			
		TARGET		REALISASI					
		LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	TAHAP OLAH LAHAN	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA *)	TERLANJUR TANAM KOMODITAS LAIN	TIDAK JELAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab..... Kab. Kab.								
	JUMLAH								

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....
Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas
.....(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)...
selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

c. Kegiatan Rawat Ratoon

Pelaksanaan Kegiatan Rawat Ratoon per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut.

No	KABUPATEN	TANAM				KONDISI YANG BELUM RAWAT RATOON		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		LUAS (HA)	LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA *)	TIDAK JELAS	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Kab..... Kab. Kab.....							
	JUMLAH							

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....
Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

d. Kegiatan Perluasan Tebu di Lahan Kering

Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tebu di Lahan Kering per Tanggal..... Dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	KABUPATEN	TANAM				KONDISI LAHAN YANG BELUM REALISASI TANAM (HA)			
		TARGET		REALISASI					
		LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	TAHAP OLAH LAHAN	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA *)	TERLANJUR TANAM KOMODITAS LAIN	TIDAK JELAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab..... Kab. Kab.....								
	JUMLAH								

No	KABUPATEN	SUMBER BENIH							
		Pembangunan KBD (APBN)				PEMBELIAN BENIH			
		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
		KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.....								
	Kab.								
	Kab.....								
	JUMLAH								

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

-
-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

-
-

e. Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tanaman Tebu Tahun 2016

Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No.	KABUPATEN	SK CP/CL		TARGET		REALISASI PELAKSANAAN					
		JUMLAH KK/KEL	LUAS (Ha)	LUAS (Ha)	ANGGARAN (Rp)	Volume (Ha)	Anggaran (Rp)	Sumber Benih (Ton/batang)			
								Kuljar		Konvensional	
								Jumlah (KU)	Asal Benih	Jumlah (KU)	Asal Benih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Keseluruhan										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

f. Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tanaman Tebu Tahun 2016

Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) per Tanggal..... Dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No.	KABUPATEN	SK CP/CL		TARGET		REALISASI PELAKSANAAN					
		JUMLAH KK/KEL	LUAS (Ha)	LUAS (Ha)	ANGGARAN (Rp)	Volume (Ha)	Anggaran (Rp)	Sumber Benih (Ton/batang)			
								Kultivar		Konvensional	
								Jumlah (KU)	Asal Benih	Jumlah (KU)	Asal Benih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Keseluruhan										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.

g. Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

No.	Realisasi Pelaksanaan		JENIS BARANG								
			Traktor 4	Fertilizer Applicator	Grabloader	Cane	Hand	Harvester	Dump Truck	GPS	Pompa Air
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Target									
		Realisasi									
2	Pembentukan ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan	Target									
		Realisasi									
3	Pra/Pasca Kualifikasi Pengadaan	Target									
		Realisasi									
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target									
		Realisasi									
5	Pengumuman Pelelangan	Target									
		Realisasi									
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target									
		Realisasi									
7	Penentuan HPS	Target									
		Realisasi									
8	Penjelasan Lelang	Target									
		Realisasi									
9	Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan	Target									
		Realisasi									
10	Evaluasi Penawaran	Target									
		Realisasi									
11	Penetapan Pemenang	Target									
		Realisasi									
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target									
		Realisasi									
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target									
		Realisasi									
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target									
		Realisasi									
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target									
		Realisasi									
16	Pelaksanaan Kontrak	Target									
		Realisasi									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

h. Kegiatan perkembangan penyaluran peralatan dan mesin tahun 2016

Pelaksanaan Kegiatan perkembangan penyaluran peralatan dan mesin tahun 2016 per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	KABUPATEN	REALISASI PENYALURAN							
		TRAKTOR 4 WD		Fertilizer Apilicator		Grabloader		Cane Thumpher	
		TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah								

No	KABUPATEN	REALISASI PENYALURAN									
		Hand Refractometer		Harvester		Dump Truck		GPS		Pompa Air	
		TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

-
.....
-
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

-
.....
-

- i. Kegiatan Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tebu/Gula Tahun 2015 dan 2016

Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tebu/Gula Tahun 2015 dan 2016per Tanggal..... Dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No.	Pabrik Gula/Tahun	Luas KTG			Tebu			
		Target Tanam	Realisasi Tanam	Realisasi Giling*	Produksi		Produktivitas	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton)	(Ton/Ha)	(Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 TA 2015 (Musim Giling 2014/2015)							
	2 TA 2016 (Musim Giling 2015/2016)							

No.	Pabrik Gula/Tahun	Gula				Rendemen		Ket **
		Produksi		Produktivitas				
		Target	Realisasi	Target	Reallsasi	Target	Realisasi	
		(Ton)	(Ton)	(Ton/Ha)	(Ton/Ha)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TA 2015 (Musim Giling 2014/2015)							
2	TA 2016 (Musim Giling 2015/2016)							

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.

2.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.

2.

Kami berharap Saudara segera menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur III

Ir. Alwi Munsir Lubis, MM
NIP. 19580516 198503 1 002

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KEPADA DIRJEN BUN OLEH IRJEN

Nomor : 2015
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Pemantauan Kinerja atas
Laporan Bulan/Triwulan ..(I, II, III,
IV)../Semesteran (I, II).. /Tahunan Kinerja
Pengembangan Areal Produktif Tanaman
Kakao Tahun 2016

Yth. Direktur Jenderal Perkebunan
di Jakarta

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Jenderal, kami sampaikan laporan
Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV)../Semesteran...(I, II).. /Tahunan hasil pemantauan
Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu TA.2016 sebagai berikut:

A. Simpulan dan Rekomendasi

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas
.....(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku
KPA sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.
.....
- 3.
.....

B. Uraian Hasil Pemantauan

- 1. Dasar Pemantauan
- 2. Tujuan Pemantauan
- 3. Ruang Lingkup Pemantauan

4. Temuan Hasil Pemantauan

a. Kegiatan Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016 (MT 2016/2017) dapat dikemukakan dalam table berikut.

No	PROVINSI	Anggaran (Rp)	TARGET		REALISASI								
			Volume Berdasarkan SK Gubernur										
			PLANT CANE (HA)	RAWAT RATOON (HA)		PLANT CANE (HA)							
				R1	R2	PERLUASAN				BONGKAR RATOON			
						ANGGARAN (APBN Rp)	APBN	SWADAYA	PG	ANGGARA N (APBN Rp)	APBN	SWADAYA	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah												

No	PROVINSI	Anggaran (Rp)	TARGET		REALISASI							
			Volume Berdasarkan SK Gubernur									
			PLANT CANE (HA)	RAWAT RATOON (HA)		RAWAT RATOON (HA)						
				R1	R2	Anggaran (R1+R2) (APBN Rp)	R1			R2		
							APBN	SWADAYA	PG	APBN	SWADAYA	PG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Jumlah											

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
-
2.
-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
-
2.
-

b. Kegiatan Bongkar Ratoon

Pelaksanaan Kegiatan Bongkar Ratoon per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	PROVINSI	TANAM				SUMBER BENIH							
		TARGET		REALISASI		Pembangunan KBD (APBN)				PEMBELIAN BENIH			
		LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
						KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kab.....												
	Kab.....												
	Kab.....												
JUMLAH													

No	PROVINSI	TANAM				KONDISI LAHAN YANG BELUM REALISASI TANAM (HA)			
		TARGET		REALISASI					
		LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	LUAS (HA)	ANGGARAN (RP)	TAHAP OLAH LAHAN	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA *)	TERLANJUR TANAM KOMODITAS LAIN	TIDAK JELAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab.....								
	Kab.....								
	Kab.....								
JUMLAH									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

-
-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

-
-

c. Kegiatan Rawat Ratoon

Pelaksanaan Kegiatan Rawat Ratoon per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	PROVINSI	TANAM				KONDISI YANG BELUM RAWAT RATOON		KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI			
		LUAS (HA)	LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA *)	TIDAK JELAS	
1	2	3	4	7	8	9	10	11
1	Kab..... Kab. Kab.....							
	JUMLAH							

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

-
.....
-
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

-
.....
-

d. Kegiatan Perluasan Tebu di Lahan Kering

Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Tebu di Lahan Kering per Tanggal.....

Dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	PROVINSI	TANAM				KONDISI LAHAN YANG BELUM REALISASI TANAM (HA)			
		TARGET		REALISASI					
		LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	LUAS (HA)	ANGGARAN (Rp)	TAHAP OLAH LAHAN	TUNGGU PANEN TANAMAN SBLMNYA *)	TERLANJUR TANAM KOMODITAS LAIN	TIDAK JELAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab..... Kab. Kab.....								
	JUMLAH								

No	PROVINSI	SUMBER BENIH							
		Pembangunan KBD (APBN)				PEMBELIAN BENIH			
		TARGET		REALISASI		TARGET		REALISASI	
		KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.	KULJAR	KONV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab..... Kab. Kab.....								
	JUMLAH								

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

-
-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

-
-

e. Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD) Tanaman Tebu Tahun 2016

Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Datar (KBD per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No.	PROVINSI	SK CP/CL		TARGET		REALISASI PELAKSANAAN					
		JUMLAH KK/KEL	LUAS (Ha)	LUAS (Ha)	ANGGARAN (Rp)	Volume (Ha)	Anggaran (Rp)	Sumber Benih (Terbatas)			
								Kuljar		Konsvensional	
								Jumlah (KU)	Asal Benih	Jumlah (KU)	Asal Benih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Keseluruhan										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
2.

- f. Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) Tanaman Tebu Tahun 2016
- Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Pembangunan Kebun Benih Induk (KBI) per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No.	PROVINSI	SK CP/CL		TARGET		REALISASI PELAKSANAAN					
		Jumlah KK/KEL	LUAS (Ha)	LUAS (Ha)	ANGGARAN (Rp)	Volume (Ha)	Anggaran (Rp)	Sumber Benih (Tonbatang)			
								Kufjar		Konvensional	
								Jumlah (KU)	Asal Benih	Jumlah (KU)	Asal Benih
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah Keseluruhan										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
2.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
2.

g. Proses Pengadaan Sarana Produksi Tahun 2016

No.	Realisasi Pelaksanaan		JENIS BARANG								
			Traktor 4	Fertilizer Aplicator	Grabloader	Cane	Hand	Harvester	Dump Truck	GPS	Pompa Air
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa	Target									
		Realisasi									
2	Pembentukan ULP/Pokja ULP/Pejabat Pengadaan	Target									
		Realisasi									
3	Pra/Pasca Kualifikasi Pengadaan	Target									
		Realisasi									
4	Penyusunan Dokumen Lelang	Target									
		Realisasi									
5	Pengumuman Pelelangan	Target									
		Realisasi									
6	Pengambilan Dokumen Lelang	Target									
		Realisasi									
7	Penentuan HPS	Target									
		Realisasi									
8	Penjelasan Lelang	Target									
		Realisasi									
9	Penyerahan Penawaran Harga dan Pembukaan	Target									
		Realisasi									
10	Evaluasi Penawaran	Target									
		Realisasi									
11	Penetapan Pemenang	Target									
		Realisasi									
12	Pengumuman Calon Pemenang	Target									
		Realisasi									
13	Sanggahan Peserta Lelang	Target									
		Realisasi									
14	Penunjukkan Pemenang Lelang	Target									
		Realisasi									
15	Penandatanganan Kontrak Perjanjian	Target									
		Realisasi									
16	Pelaksanaan Kontrak	Target									
		Realisasi									

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

h. Kegiatan perkembangan penyaluran peralatan dan mesin tahun 2016

Pelaksanaan Kegiatan perkembangan penyaluran peralatan dan mesin tahun 2016 per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No	PROVINSI	REALISASI PENYALURAN							
		TRAKTOR 4 WD		Fertilizer Aplicator		Grabloader		Cane Thumpher	
		TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah								

No	PROVINSI										
		Hand Refractometer		Harvester		Dump Truck		GPS		Pompa Air	
		TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	TARGET (unit)	REALISASI (unit)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Jumlah										

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1.
.....
2.
.....

- i. Kegiatan Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tebu/Gula Tahun 2015 dan 2016
Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Tebu/Gula Tahun 2015 dan 2016per Tanggal..... dapat dikemukakan pada tabel berikut:

No.	Pabrik Gula/Tahun	Luas KTG			Tebu			
		Target Tanam	Realisasi Tanam	Realisasi Gilling*	Produksi		Produktivitas	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
		(Ha)	(Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ton)	(Ton/Ha)	(Ton/Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 TA 2015 (Musim Gilling 2014/2015)							
	2 TA 2016 (Musim Gilling 2015/2016)							

No.	Pabrik Gula/Tahun	Gula				Rendemen		Ket **
		Produksi		Produktivitas				
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
		(Ton)	(Ton)	(Ton/Ha)	(Ton/Ha)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1 TA 2015 (Musim Gilling 2014/2015)							
	2 TA 2016 (Musim Gilling 2015/2016)							

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa.....

Belum tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

-
-

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

-
-

Inspektur III

Ir. Alwi Munsir Lubis, MM
NIP. 19580516 198503 1 002

Tembusan:
Menteri Pertanian RI

SURAT PENGANTAR MASALAH KE SATKER

..... 2016

Nomor : B..../PW.130/H/7/2015
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
Perihal : Pengantar Masalah Laporan Hasil Pemantauan
Kinerja atas Laporan Bulan./Triwulan...(I, II, III,
IV).. /Semesteran (I, II).. /Tahunan Kinerja
Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu
Tahun 2016

Yth. Kepala Dinas(yang Membidangi Perkebunan)
Provinsi/Kabupaten (Satker Mandiri).....
di

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 20XX, Kami telah melakukan Pemantauan Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV).. /Semesteran...(I, II).. /Tahunan atas Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016 dengan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Kegiatan Bongkar Ratoon sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
2. Realisasi anggaran Kegiatan Rawat Ratoon sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
3. Realisasi anggaran Kegiatan Perluasan Tanaman Tebu sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....

- 2.
- 3.

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

Justan R. Siahaan
NIP. 19600220 198203 1 001

Tembusan:
Direktur Jenderal Perkebunan

SURAT PENGANTAR MASALAH KEPADA DITJENBUN

..... 2016

Nomor : B...../PW.130/H/7/2015
Sifat : Rahasia/Terbatas
Lampiran :
**Perihal : Pengantar Masalah Laporan Hasil Pemantauan
Kinerja atas Laporan Bulan.../Triwulan...(I, II, III,
IV).../Semesteran...(I, II).. /Tahunan Kinerja
Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu
Tahun 2016**

Yth. Direktur Jenderal Perkebunan
di Jakarta

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian TA. 20XX, Kami telah melakukan Pemantauan Bulan.../Triwulan(I, II, III, IV).../Semesteran...(I, II).. /Tahunan atas Kinerja Pengembangan Areal Produktif Tanaman Tebu Tahun 2016 dengan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Realisasi anggaran Kegiatan Bongkar Ratoon sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
2. Realisasi anggaran Kegiatan Rawat Ratoon sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....
3. Realisasi anggaran Kegiatan Perluasan Tanaman Tebu sampai dengan bulan..... 20XX sebesar Rp.....,00 atau% dari anggaran sebesar Rp.....,00, dengan realisasi fisik sebesar%. Tidak tercapainya target disebabkan.....

Terhadap permasalahan tersebut kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas(yang membidangi perkebunan) Provinsi/Kabupaten (satker Mandiri)... selaku KPA sebagai berikut:

1.
.....
2.

.....
3.
.....

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

- 1.
.....
- 2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal

Justan R. Siahaan
NIP. 19600220 198203 1 001

Tembusan:
Menteri Pertanian RI sebagai laporan